



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 241 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kemampuan petani dalam produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka perlu adanya pupuk bersubsidi;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan pupuk bersubsidi sektor pertanian sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Garut Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-dag/Per/2/2009 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan.
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.
10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan Penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pada Penyalur resmi Lini IV.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi Anorganik Urea, SP-36, ZA dan NPK (Phonska atau Kujang) dan pupuk organik dalam kemasan 50 (lima puluh) kilogram, 40 (empat puluh) kilogram dan/atau 20 (dua puluh) kilogram oleh Pengecer Resmi di Lini IV kepada petani/kelompok tani, yang dibeli secara tunai.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
13. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.

17. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
18. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk anorganik (Urea, SP-36, ZA dan NPK) dan pupuk organik di dalam negeri.
19. Penyalur Lini III/Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan perjanjian jual beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, Penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan/udang dan/atau kelompok tani melalui Pengecer Resmi yang ditunjuk.
20. Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang ditunjuk oleh Penyalur Lini III/Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung hanya kepada petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan/atau kelompok tani.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara langsung bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RKPBB adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
23. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
24. Penyaluran Pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
25. Wilayah tanggung jawab Produsen, Penyalur Lini III/Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi adalah Provinsi dan/atau Kabupaten termasuk Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani.
26. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau Penyalur Lini III/Distributor pupuk di Daerah yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
27. Lini IV adalah lokasi gudang Penyalur Lini IV/Penyalar Resmi pupuk di wilayah Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Penyalur Lini III/ Distributor.
28. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah yang selanjutnya disebut KP3 Daerah adalah wadah koordinasi instansi terkait di Daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

JENIS DAN PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Jenis pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Daerah terdiri atas pupuk anorganik dan organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali bagi pembudidaya ikan atau udang, paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III**ALOKASI DAN REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI****Bagian Kesatu****Alokasi Pupuk Bersubsidi****Pasal 4**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknik minimal dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala UPTD Tanaman Pangan dan Hortikultura setempat.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut desa/kelurahan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan oleh UPTD Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan bersama koordinator penyuluh pertanian dan disahkan oleh Camat paling lama pada akhir bulan November 2010.

Bagian Kedua**Realokasi Pupuk Bersubsidi****Pasal 5**

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut selaku Ketua KP3 Daerah, menyampaikan rekomendasi realokasi antar Kecamatan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan realokasi antar Kecamatan.
- (4) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di Daerah pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka Distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya atas dasar rekomendasi dari UPTD Tanaman pangan dan Hortikultura Kecamatan sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI****Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi dilaksanakan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) wilayah tanggung jawabnya; dan
 - b. penyalur pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangan jumlah pupuk bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 7

- (1) Produsen, Penyalur Lini III/Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi wajib menyampaikan ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di Daerah, sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut untuk penyerapan pupuk bersubsidi, sesuai alokasi dan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Produsen, Penyalur Lini III/Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga sesuai HET.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :
 - a. produsen wajib melaksanakan pengadaan, penyediaan dan penyimpanan dari Lini I sampai dengan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi dan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah;
 - b. penyalur Lini III/Distributor wajib melaksanakan pengadaan, penyediaan, penyimpanan dari Penyalur Lini III/Distributor sampai dengan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi dan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah; dan
 - c. penyalur Lini IV/Pengecer Resmi wajib melaksanakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Produsen, Penyalur Lini III/Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing, sebagai berikut :
 - a. produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut, paling lama tanggal 1 Maret tahun berjalan;
 - b. penyalur Lini III/Distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, KP3 Daerah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut, paling lama tanggal 1 Februari tahun berjalan; dan

- c. penyalur Lini IV/Pengecer Resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya dan harus disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Kepala UPTD Tanaman Pangan dan Hortikultura serta petugas teknis lapangan setempat yang diselesaikan paling lama tanggal 1 Desember sebelum tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Penetapan wilayah tanggung jawab produsen, Penyalur Lini III/Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. produsen menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Distributor berdasarkan usulan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut dan dicantumkan dalam Perjanjian Jual Beli (PJB).
 - b. penyalur Lini III/Distributor menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi dan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut dan dicantumkan dalam Perjanjian Jual Beli (PJB); dan
 - c. penyalur Lini IV/Pengecer Resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan RKPB yang sudah diajukan serta melakukan pencatatan Penyaluran kepada petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi, di tempat yang terlihat dan terbaca oleh pembeli.
- (3) Produsen, Penyalur Lini III/Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Penyaluran pupuk oleh produsen, Penyalur Lini III/Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi kepada kelompok tani/petani dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan kelompok atau RKPB dengan persetujuan Penyuluh Lapangan setempat.

Pasal 10

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi di Penyalur Lini IV/ Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - d. Pupuk NPK Phonska = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk NPK Kujang = Rp. 2.300,- per kg
 - f. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 (lima puluh) kilogram, 40 (empat puluh) kilogram dan/atau 20 (dua puluh) kilogram yang dibeli secara tunai oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi.

Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberi label berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah".
Barang dalam Pengawasan
- (2) Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi.

BAB V**PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN****Bagian Kesatu****Pengawasan****Pasal 12**

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Produsen, Penyalur Lini III/Distributor, Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi dan KP3 Daerah.
- (2) Pengawasan oleh Produsen, Penyalur Lini III/Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. produsen wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV/Pengecer Resmi;
 - b. Penyalur Lini III/Distributor wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III/Distributor sampai dengan Lini IV/Pengecer Resmi setempat; dan
 - c. Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan dan keadaan tanaman serta penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok petani setempat.
- (3) KP3 Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di daerah, KP3 Daerah dibantu oleh Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan penyuluh pertanian lapangan.

Pasal 13

- (1) KP3 Daerah dapat mengklarifikasi adanya indikasi pelanggaran dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen, Penyalur Lini III/Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi adanya pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam Penyaluran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang pupuk dan pestisida dan/atau aparat penegak hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua**Evaluasi dan Pelaporan****Pasal 14**

Evaluasi atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Daerah dilaksanakan setiap bulan oleh KP3 Daerah.

Pasal 15

- (1) Produsen pupuk bersubsidi wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a setiap bulan kepada Gubernur melalui KP3 Daerah.
- (2) Penyalur Lini III/Distributor pupuk bersubsidi wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b setiap bulan kepada Bupati melalui KP3 Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada :
- a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut;
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut;
 - c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Garut; dan
 - d. KP3 Daerah.
- (4) KP3 Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi yang telah dilaksanakan oleh KP3 Daerah kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Distributor pupuk bersubsidi wajib melaporkan permasalahan dan upaya penanggulangan terhadap keadaan yang mengisyaratkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi kepada Bupati melalui KP3 Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 - 3 - 2011
B U P A T I G A R U T,**

t t d

ACENG H.M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 - 3 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT


**BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/ IVa
NIP. 19690520 199603 1 005**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 241 TAHUN 2011
TANGGAL 14 - 3 - 2011**

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2011

NO	JENIS PUPUK	JENIS PUPUK BERSUBSIDI					
		UREA (KG)	SP 18 (KG)	NPK		ZA (KG)	ORGANIK (KG)
				PHONSKA (KG)	KUJANG (KG)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sub Sektor Tanaman Pangan	37,800,000	5,874,144	12,206,395	4,300,000	1,231,500	3,698,000
2.	Sub Sektor Hortikultura	2,700,000	633,548	2,816,860	-	11,768,500	-
3.	Sub Sektor Perkebunan	4,500,000	2,492,308	1,976,744	-	2,000,000	-
JUMLAH		45,000,000	9,000,000	17,000,000	4,300,000	15,000,000	3,698,000

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

|

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 241 TAHUN 2011
TANGGAL 14 - 3 - 2011**

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2011

A. UREA

NO.	KECAMATAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Cisewu	63,050	34,950	154,457	52,315	37,217	31,495	15,962	1,673	1,673	238,768	183,386	27,244	842,190
2.	Caringin	33,400	61,102	118,254	4,730	32,583	48,933	39,123	1,050	1,050	453,849	239,236	22,484	1,055,794
3.	Talegong	57,180	55,153	34,935	108,100	139,507	102,535	85,372	28,283	447	216,852	224,205	264,128	1,316,696
4.	Bungbulang	21,340	21,340	277,867	283,704	29,190	112,246	106,486	1,340	3,792	407,885	703,296	76,158	2,044,641
5.	Mekar Mukti	17,002	70,866	68,049	502	10,502	84,914	82,487	7,042	502	251,768	225,656	10,502	829,790
6.	Pakenjeng	194,415	178,391	116,491	109,594	31,252	71,309	74,579	42,222	40,419	393,686	271,654	92,362	1,616,375
7.	Pamulihan	84,409	69,719	66,026	27,193	41,886	40,041	38,724	12,379	13,488	86,437	89,949	84,896	655,149
8.	Cikelet	123,943	143,528	50,911	38,531	65,092	68,407	46,944	29,963	22,442	379,862	630,333	44,432	1,644,386
9.	Pameungpeuk	13,265	127,903	67,200	6,165	56,945	31,950	54,066	3,265	73,079	265,021	197,529	13,265	909,655
10.	Cibalong	164,631	224,292	143,288	43,859	48,536	48,597	43,472	31,472	31,146	286,171	358,496	331,921	1,755,881
11.	Cisompet	82,633	74,150	69,543	39,010	50,193	57,618	45,355	25,180	41,408	150,447	278,182	59,185	972,904
12.	Singajaya	56,059	55,369	58,030	53,378	52,401	38,881	40,856	28,950	44,704	89,931	34,347	15,879	568,785
13.	Cihurip	24,129	22,796	22,544	20,103	14,046	14,046	15,027	13,210	12,392	75,616	48,360	31,016	313,286
14.	Peundeuy	63,191	57,932	67,650	73,002	76,431	79,349	70,010	76,273	72,752	127,306	127,942	93,465	985,303
15.	Cikajang	67,978	107,455	112,965	57,467	64,680	59,637	60,763	37,957	34,413	82,366	85,051	89,559	860,291
16.	Banjarwangi	163,001	153,741	131,913	91,624	87,186	91,387	95,361	79,418	107,683	228,512	195,159	159,476	1,584,462
17.	Cilawu	190,430	176,331	137,014	93,507	139,477	123,351	131,726	88,896	76,982	223,193	207,486	180,676	1,769,070
18.	Bayongbong	200,273	135,066	143,727	68,981	131,536	79,501	69,429	89,630	87,364	242,635	179,975	165,395	1,593,514
19.	Cigedug	49,053	41,344	39,265	39,958	48,189	54,750	48,675	22,363	24,944	51,683	64,158	61,329	545,713
20.	Cisurupan	93,122	74,044	72,376	81,201	93,994	144,637	170,732	66,279	61,355	98,474	114,024	122,923	1,193,163
21.	Sukaresmi	47,069	44,836	47,156	35,543	64,264	49,022	31,948	20,809	16,369	98,278	106,345	89,803	651,442
22.	Samarang	67,523	83,055	75,601	66,609	78,619	78,954	76,684	49,000	69,147	317,207	271,890	221,608	1,455,897
23.	Pasir Wangi	68,580	54,842	45,352	31,974	57,903	38,051	33,601	18,043	19,455	94,486	156,256	133,906	752,448
24.	Tarogong Kaler	50,584	29,721	64,819	49,042	39,232	41,010	29,191	25,921	40,261	135,125	162,194	25,256	692,356
25.	Tarogong Kidul	63,937	60,091	56,733	35,195	29,714	28,736	33,569	28,736	32,395	60,894	55,372	58,974	544,347
26.	Garut Kota	42,786	72,268	87,617	35,785	59,136	81,113	40,644	53,453	73,462	76,126	125,968	88,311	836,668
27.	Karangpawitan	89,159	104,386	115,663	110,784	69,728	45,702	56,373	38,458	100,658	109,310	280,257	113,813	1,234,293
28.	Wanaraja	24,473	163,642	94,073	24,575	31,424	44,445	35,683	20,112	17,880	107,417	107,690	102,984	774,398
29.	Pangatian	37,039	71,740	59,180	40,050	49,408	32,752	40,532	11,946	19,836	73,660	134,866	125,897	696,906
30.	Sucinaraja	86,847	90,884	49,279	26,034	35,742	33,418	29,260	28,683	3,276	185,247	185,714	88,391	842,775
31.	Sukawening	53,267	58,009	129,615	52,587	103,191	86,075	34,628	44,759	92,607	44,111	292,576	85,878	1,077,305
32.	Karang Tengah	42,530	34,642	70,466	168,705	32,743	29,369	26,149	9,703	58,336	91,001	203,779	51,413	818,836
33.	Banyuresmi	44,049	78,384	305,026	95,923	78,384	79,319	66,478	64,836	81,090	66,122	711,794	158,352	1,829,757
34.	Leles	47,748	46,113	182,588	64,128	52,163	74,725	40,881	43,664	56,908	146,474	399,324	65,540	1,220,256
35.	Leuwigoong	30,183	53,073	77,049	44,343	156,980	156,118	34,271	49,248	41,073	110,307	99,812	43,911	896,368
36.	Kadungora	81,765	83,419	194,998	81,627	66,809	91,257	78,504	77,699	111,512	217,586	253,107	176,555	1,514,841
37.	Cibiuk	41,659	42,991	90,297	16,659	17,909	85,853	9,465	14,534	42,002	50,432	165,994	31,814	609,610
38.	Cibatu	100,005	53,868	66,839	123,802	104,763	45,244	22,833	15,084	11,487	49,300	100,105	83,554	776,883
39.	Kersamanah	63,489	13,335	17,531	31,327	31,002	27,011	25,319	25,319	25,233	109,332	95,650	83,980	548,527
40.	Malangbong	182,796	125,284	64,444	164,042	113,526	77,065	81,385	23,057	22,730	260,277	467,764	180,493	1,762,864
41.	Limbangan	78,333	97,925	105,997	55,523	86,287	107,869	52,443	42,732	65,785	59,144	416,048	180,719	1,348,806
42.	Selaawi	61,865	12,815	195,730	79,748	12,815	12,815	62,719	815	129,134	12,815	433,539	42,562	1,057,370
	Jumlah	3,168,193	3,360,795	4,148,560	2,726,930	2,622,587	2,729,506	2,277,709	1,393,456	1,882,672	6,825,113	9,684,469	4,180,010	45,000,000

NO.	KECAMATAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Cisewu	14,351	7,452	33,104	9,421	8,663	7,637	4,018	-	-	36,841	38,711	6,467	166,664	
2.	Caringin	12,514	16,514	20,704	173	12,087	15,687	13,527	-	-	54,641	31,826	9,749	187,421	
3.	Talegong	10,546	8,951	5,529	12,305	22,590	16,672	13,224	4,871	-	29,341	27,661	36,871	188,560	
4.	Bungbulang	21,107	21,107	70,497	62,448	21,020	40,801	37,568	-	572	74,862	130,255	32,233	512,471	
5.	Mekar Mukti	2,082	10,943	11,223	-	2,088	12,282	11,604	1,445	-	31,902	30,801	2,207	116,577	
6.	Pakenjenc	44,605	42,055	34,038	22,287	18,893	27,583	29,005	8,293	6,975	66,651	50,239	32,066	382,690	
7.	Pamulihan	23,629	22,695	21,789	4,979	18,608	18,147	17,784	2,000	2,346	24,080	25,073	24,468	205,598	
8.	Cikelel	30,390	30,465	18,155	3,344	21,671	21,755	17,675	2,228	572	52,259	76,223	15,443	290,178	
9.	Pameungpeuk	7,649	24,217	19,277	-	11,782	11,609	9,022	-	15,405	25,424	48,221	7,649	180,255	
10.	Cibalong	24,151	32,879	22,989	4,712	10,607	9,667	9,667	2,052	2,027	37,628	41,828	38,302	236,511	
11.	Cisompet	28,756	26,819	25,499	6,398	21,448	23,248	20,548	3,518	6,778	34,504	52,333	23,428	273,278	
12.	Singaiaya	20,652	20,618	20,687	10,613	18,855	16,964	17,432	5,721	9,481	25,940	15,740	11,500	194,204	
13.	Cihurip	6,288	6,012	5,858	3,681	4,347	4,180	4,345	2,850	2,530	11,593	8,915	7,226	67,823	
14.	Peundeuy	9,388	9,988	10,586	9,003	11,614	12,232	11,595	9,340	8,430	16,156	17,239	14,819	140,389	
15.	Cikajang	28,329	30,656	33,826	14,042	25,392	24,475	28,494	7,736	8,756	29,295	31,642	32,640	295,285	
16.	Banjarwang	34,444	31,772	29,305	20,509	26,550	27,568	28,282	16,573	21,513	38,768	36,344	31,646	343,273	
17.	Cilawu	35,691	33,642	29,855	11,919	27,019	25,480	26,925	11,429	10,837	40,594	38,763	35,260	327,414	
18.	Bayongbonc	39,339	26,119	26,266	15,455	32,531	21,911	18,625	19,326	17,034	39,160	34,372	29,054	319,193	
19.	Cigedug	20,569	18,425	17,943	12,555	22,158	20,891	16,974	5,168	4,586	19,227	27,084	25,973	211,555	
20.	Cisurupan	27,168	24,021	20,911	14,458	26,250	32,917	38,401	14,210	12,324	26,708	30,185	32,103	299,655	
21.	Sukaresmi	17,813	15,287	15,274	10,423	19,271	15,097	11,705	3,804	3,035	21,112	23,182	22,089	178,093	
22.	Samarang	18,250	19,803	18,797	14,222	21,506	20,431	19,988	10,311	14,463	50,452	44,532	35,994	288,750	
23.	Pasir Wangi	24,868	15,214	14,104	10,782	14,971	11,312	10,430	5,710	5,545	18,456	30,067	29,273	190,731	
24.	Tarogong Kalel	11,706	6,796	12,333	11,441	9,265	9,310	6,657	6,311	9,265	8,656	17,229	21,741	127,380	
25.	Tarogong Kidu	14,097	13,205	12,417	6,648	6,682	5,825	6,560	5,671	6,404	11,909	10,842	11,570	111,831	
26.	Garut Kota	9,371	12,990	16,865	5,992	12,770	16,884	7,199	10,828	15,518	13,513	18,515	15,637	156,083	
27.	Karangpawitar	14,590	16,979	18,761	18,241	13,098	8,728	11,588	7,762	19,026	18,431	40,682	20,179	208,063	
28.	Wanaraja	7,603	19,730	12,901	5,260	6,788	7,901	12,901	6,933	3,659	3,665	14,070	16,877	17,805	123,191
29.	Pangatikar	10,154	12,718	10,265	8,149	9,546	7,502	9,027	2,153	4,881	9,192	19,007	15,771	118,364	
30.	Sucinaraja	11,773	12,898	6,404	5,427	5,483	4,474	3,768	5,982	-	27,377	24,571	12,070	120,224	
31.	Sukawening	10,136	11,074	17,527	11,251	14,778	14,407	5,926	8,674	15,954	8,033	36,283	15,802	169,845	
32.	Karang Tengah	9,535	8,190	12,096	20,982	6,408	6,396	5,769	1,976	10,706	14,155	24,255	10,260	130,727	
33.	Banyuresm	16,374	22,516	48,087	13,946	22,356	20,567	19,147	12,982	13,062	19,543	81,618	31,168	321,366	
34.	Leles	15,671	15,311	36,992	13,151	16,167	21,611	14,585	9,567	12,431	28,582	61,083	19,451	264,600	
35.	Leuwigoonc	5,001	10,746	13,952	9,722	19,953	19,705	6,031	10,802	9,002	13,054	11,178	7,734	136,879	
36.	Kadungora	22,102	21,785	32,037	14,243	18,260	23,290	20,281	15,264	15,560	30,596	34,549	36,517	284,485	
37.	Cibiuk	5,744	6,814	12,366	3,604	3,751	11,100	2,020	3,136	9,184	7,182	17,222	5,012	87,135	
38.	Cibatu	19,958	9,733	9,082	18,511	17,491	5,499	3,113	2,842	2,103	6,099	12,602	9,937	116,970	
39.	Kersamanah	8,805	2,669	2,209	6,030	6,078	5,509	5,337	5,413	5,373	20,480	19,178	17,578	104,662	
40.	Malangbonc	47,841	33,433	21,275	29,225	34,570	26,848	27,620	3,777	4,460	46,974	66,133	43,514	385,669	
41.	Limbangan	15,146	17,620	18,876	11,775	17,108	21,860	9,704	9,329	14,405	9,253	40,789	23,047	208,911	
42.	Selaaw	22,233	11,857	33,193	15,102	11,433	11,433	21,473	192	18,480	11,433	53,208	17,014	227,048	
	Jumlah	780,419	762,714	873,854	502,428	671,903	687,394	609,579	262,903	342,078	1,132,700	1,501,568	872,461	9,000,000	

C. ZA

NO.	KECAMATAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Cisewu	2,056	2,056	13,522	874	2,056	6,744	2,056	-	-	106,132	3,683	2,056	141,235
2.	Caringin	4,950	4,950	24,716	186	-	-	-	-	-	16,960	9,068	-	60,830
3.	Talegong	27,131	7,597	21,176	33,316	42,548	22,135	5,683	1,067	-	49,784	20,036	28,987	259,461
4.	Bunqbulang	20,450	20,450	27,702	5,228	18,702	14,015	15,305	-	-	21,958	33,181	14,015	191,008
5.	Mekar Mukt	2,013	4,056	3,776	-	2,026	6,206	13,741	-	-	13,428	10,633	4,423	60,304
6.	Pakenjenc	12,702	8,643	4,853	660	4,833	2,229	16,276	6,272	724	28,545	11,003	9,085	105,826
7.	Pamulihan	20,960	32,897	22,883	18,736	15,524	13,447	10,022	4,199	6,915	24,410	36,440	21,204	227,639
8.	Cikelel	1,495	4,033	-	-	292	614	-	-	390	7,000	22,549	-	36,372
9.	Pameungpeuk	-	4,014	-	-	4,524	-	1,470	-	115	7,771	-	-	17,893
10.	Cibalong	9,149	9,907	5,176	230	316	273	273	273	230	10,982	10,982	10,982	58,770
11.	Cisompet	-	-	117	-	-	235	-	-	254	2,835	6,491	-	9,932
12.	Singajaya	728	1,533	1,431	473	1,811	1,166	1,166	258	-	2,734	1,443	1,378	14,121
13.	Cihurip	2,764	3,004	1,376	-	5,839	2,447	1,418	2,819	-	6,253	4,505	4,869	35,295
14.	Peundeuy	2,270	980	1,305	2,881	3,246	3,246	2,429	3,117	1,736	5,183	6,968	4,108	37,469
15.	Cikajang	173,156	144,316	195,519	156,588	113,208	109,008	192,248	82,972	104,005	146,723	183,431	191,208	1,792,381
16.	Banjarwang	46,032	24,297	28,430	13,487	16,073	18,394	15,074	9,633	6,909	30,465	37,176	41,693	287,664
17.	Cilawu	42,853	56,477	60,580	36,713	31,873	40,634	30,458	24,905	22,992	60,341	59,766	54,268	521,861
18.	Bayongbonc	102,073	97,198	79,375	58,454	87,461	100,177	78,317	41,790	50,787	106,377	204,136	86,015	1,092,159
19.	Ciqedug	124,761	94,182	92,846	169,598	158,875	121,698	55,147	61,267	46,239	81,045	230,365	209,269	1,445,293
20.	Cisurupan	79,597	104,314	76,925	79,878	95,996	87,439	73,921	66,004	60,928	87,209	87,617	77,552	977,381
21.	Sukaresmi	115,115	54,064	62,689	67,118	58,103	35,386	24,765	15,146	10,345	41,956	46,075	6,905	537,666
22.	Samarang	56,581	74,563	73,644	54,693	67,296	58,066	45,142	27,603	26,529	91,591	80,155	64,912	720,774
23.	Pasir Wangi	284,438	120,070	121,916	105,956	109,751	83,521	80,076	60,950	46,366	98,723	132,406	131,795	1,375,969
24.	Tarogong Kalel	32,810	40,367	41,983	19,902	34,577	24,672	22,010	14,502	6,080	29,690	49,771	35,734	352,099
25.	Tarogong Kidu	7,524	5,133	4,753	7,902	9,616	6,501	6,621	1,415	546	4,181	3,447	2,502	60,141
26.	Garut Kota	8,814	7,685	7,154	5,236	5,118	6,015	4,937	2,615	2,400	6,970	10,411	5,465	72,820
27.	Karangpawitar	25,601	28,023	26,772	19,583	19,443	14,207	18,525	6,854	11,133	24,613	48,871	18,951	262,575
28.	Wanaraja	66,167	48,978	46,655	23,461	28,258	28,799	28,259	11,861	15,311	26,560	91,616	134,740	550,666
29.	Pangatikar	105,766	94,798	60,580	60,654	71,302	80,425	72,047	2,475	35,019	36,871	74,585	42,223	736,745
30.	Sucinaraja	49,331	87,785	50,495	22,120	30,744	28,653	28,359	24,262	646	155,724	62,155	68,664	608,937
31.	Sukawening	10,346	8,225	22,131	228	13,214	13,422	8,225	3,021	5,511	8,600	24,961	12,270	130,154
32.	Karang Tengah	18,347	27,112	20,322	20,551	13,301	13,230	15,052	3,228	5,445	13,332	27,931	18,496	196,348
33.	Banyuresm	53,017	24,646	42,839	13,453	21,446	21,444	22,307	913	3,708	19,190	84,819	46,238	354,020
34.	Leles	15,013	15,013	79,697	-	15,031	15,013	23,546	1,060	-	66,716	249,219	15,031	495,341
35.	Luwigoonc	2,501	16,599	13,355	-	20,609	15,427	5,105	-	-	8,993	6,926	10,365	99,879
36.	Kadungora	36,746	20,320	55,411	11,452	21,102	15,147	11,119	1,685	4,854	67,499	32,241	11,119	288,695
37.	Cibiuk	7,743	14,329	22,414	-	8,055	13,438	5,055	-	-	9,342	18,128	31,115	129,619
38.	Cibatu	11,077	25,195	14,700	35,353	14,072	11,182	14,009	1,482	2,545	9,518	11,112	6,155	156,401
39.	Kersamanah	3,934	5,188	1,994	218	2,967	1,310	1,203	1,520	-	2,278	2,653	1,904	25,169
40.	Malangbonc	3,552	14,805	14,148	3,860	2,965	9,081	58,052	-	15,138	78,228	77,816	3,569	281,213
41.	Limbangan	2,029	5,406	6,132	1,431	2,029	2,029	2,998	-	-	5,384	41,987	15,880	85,307
42.	Selaaw	2,083	10,565	14,448	1,911	2,083	2,083	2,620	3,729	7,073	2,083	55,812	2,083	106,572
	Jumlah	1,593,673	1,373,772	1,465,944	1,052,382	1,176,289	1,049,157	1,015,036	488,898	500,873	1,624,176	2,212,571	1,447,229	15,000,000

E. ORGANIK

NO.	KECAMATAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Cisewu	7,833	2,645	20,126	6,043	3,735	2,827	363	-	-	10,945	25,028	2,153	81,697
2.	Caringin	2,594	4,902	4,176	-	2,464	5,057	3,501	-	-	10,997	5,680	545	39,915
3.	Talegong	3,424	2,983	726	3,501	10,763	8,196	5,576	2,827	-	8,351	6,977	13,020	66,343
4.	Bungbulang	-	-	31,901	44,791	-	14,420	10,686	-	389	21,708	61,494	8,248	193,636
5.	Mekar Mukt	-	4,798	5,187	-	-	4,539	3,372	1,037	-	10,374	11,023	-	40,330
6.	Pakenjenc	14,265	12,475	8,922	15,717	-	6,354	6,873	5,706	4,642	16,754	11,178	9,337	112,224
7.	Pamulihan	2,723	2,594	2,594	2,334	1,815	1,556	1,426	1,167	1,426	3,112	3,112	3,890	27,751
8.	Cikelel	9,389	7,547	1,738	2,256	4,487	4,202	1,608	1,452	259	12,216	10,763	-	55,917
9.	Pameungpeuk	-	9,285	8,377	-	-	2,853	-	-	11,075	-	29,230	-	60,819
10.	Cibalong	6,484	10,374	6,095	2,594	1,297	648	648	648	648	7,781	6,484	7,781	51,482
11.	Cisompet	9,674	8,170	7,003	4,539	4,409	5,706	3,761	2,464	4,668	9,077	16,210	5,836	81,516
12.	Singaiaya	6,588	6,562	6,302	7,132	4,331	3,942	4,279	3,968	6,821	9,467	2,983	-	62,375
13.	Cihurip	3,372	3,164	3,112	2,075	1,919	1,919	2,075	1,945	1,815	3,631	3,631	3,631	32,290
14.	Peundeuy	3,501	4,798	4,279	4,928	4,461	4,928	5,135	4,980	4,357	4,150	5,317	6,769	57,603
15.	Cikajang	648	648	519	1,815	1,297	882	908	648	648	1,815	1,815	1,971	13,616
16.	Banjarwang	10,374	9,596	8,429	14,265	11,023	11,671	12,319	10,893	14,005	9,077	9,726	7,392	128,771
17.	Cilawu	9,077	7,132	6,354	4,435	4,305	3,657	5,161	5,135	5,836	10,374	9,985	8,818	80,271
18.	Bayongbonc	16,858	8,429	9,077	8,299	17,507	9,389	7,807	11,697	8,714	13,616	7,651	9,726	128,771
19.	Cigedug	1,297	1,167	1,037	1,686	1,426	1,504	1,193	674	648	1,556	1,504	1,478	15,172
20.	Cisurupan	7,547	4,331	2,127	4,720	5,343	8,507	12,942	6,743	5,317	6,588	8,870	10,348	83,383
21.	Sukaresmi	2,697	3,424	2,671	4,902	5,965	4,072	2,256	1,686	1,556	5,343	6,691	9,441	50,704
22.	Samarang	5,991	5,057	4,642	7,703	7,910	7,132	7,651	6,432	9,467	15,691	14,135	10,348	102,161
23.	Pasir Wangi	3,683	3,060	2,645	3,683	3,242	2,594	2,334	1,790	2,205	3,968	9,077	10,478	48,759
24.	Tarogong Kalel	7,781	3,112	6,484	7,521	5,965	6,354	4,539	4,020	5,836	4,409	5,965	2,983	64,969
25.	Tarogong Kidu	9,856	9,337	8,818	3,890	4,539	3,761	4,150	3,761	4,279	7,781	7,132	7,651	74,954
26.	Garut Kota	6,484	7,781	10,374	3,112	9,077	11,412	3,890	7,262	10,893	7,781	7,781	10,374	96,221
27.	Karangpawitar	7,392	8,429	9,233	9,077	8,040	5,706	7,677	5,187	11,930	9,337	16,080	11,879	109,967
28.	Wanaraja	1,867	1,945	1,764	2,931	2,645	2,542	2,205	1,867	2,075	3,009	3,060	2,620	28,529
29.	Pangatikar	3,372	2,230	3,735	2,075	3,372	2,334	3,735	1,452	2,205	2,205	4,539	3,242	34,494
30.	Sucinaraja	2,775	1,375	389	2,905	2,023	1,167	778	2,983	-	4,279	6,406	2,023	27,103
31.	Sukaweninc	6,614	7,366	6,380	8,092	6,691	8,066	3,657	5,576	8,974	5,161	11,671	9,674	87,922
32.	Karang Tengah	6,484	5,187	5,706	5,187	4,020	4,409	3,890	1,297	6,484	7,132	5,006	5,109	59,911
33.	Banyuresm	4,928	10,374	14,524	5,965	10,374	7,781	7,651	8,818	7,003	8,429	9,856	11,152	106,855
34.	Leles	4,798	4,539	11,749	9,467	4,539	9,077	3,709	6,847	8,948	7,781	8,948	7,521	87,922
35.	Leuwigoonc	2,853	6,484	7,781	7,003	5,187	6,328	3,501	7,781	6,484	4,383	3,631	4,539	65,954
36.	Kadungora	9,441	9,804	7,651	8,637	7,236	11,075	9,052	10,867	6,614	4,798	6,640	17,507	109,319
37.	Cibiuk	2,334	3,086	3,864	2,594	2,594	2,308	1,452	2,256	6,614	3,813	3,890	1,245	36,051
38.	Cibatu	13,538	5,446	3,579	7,080	9,907	1,945	1,297	1,971	1,401	2,723	4,928	4,020	57,837
39.	Kersamanah	3,761	1,556	1,556	3,890	3,890	3,890	3,838	3,838	3,864	12,838	12,968	12,319	68,211
40.	Malangbonc	22,694	10,763	2,983	18,440	13,850	8,066	5,836	2,671	2,620	10,245	13,512	16,832	128,511
41.	Limbangan	9,985	11,152	11,827	8,429	11,723	15,146	6,354	6,717	10,374	4,980	8,040	8,740	113,469
42.	Selaaw	7,781	-	7,392	9,648	-	-	6,873	-	8,299	-	4,798	3,501	48,292
	Jumlah	262,754	233,110	273,829	273,362	213,373	227,923	185,959	157,067	199,394	307,675	413,415	274,140	3,022,000

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

